



DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA

The Impact of Fiscal Policy on Poverty in Indonesia

Pausan¹, Bustan Ramli², Aulia Rahman Bato³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

e-mail: pausanmuktar21@gmail.com

Article History: Received: October 24, 2024; Revised: December 17, 2024; Accepted: December 25, 2024

ABSTRAK

Salah satu masalah sosial yang menjadi tantangan baik negara maju maupun negara berkembang ialah kemiskinan. Masalah kemiskinan juga menjadi salah satu hambatan dalam proses pembangunan suatu negara, termasuk di Indonesia. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh belanja bantuan sosial, belanja infrastruktur, dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap kemiskinan di Indonesia. Data yang digunakan berupa *time series* tahun 2009-2023 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan model regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya, belanja infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Sedangkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Kata kunci: Kemiskinan, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Infrastruktur, Dana Alokasi Khusus.

ABSTRACT

One of the social problems that is a challenge both developed and developing countries, is poverty. The problem of poverty is also one of the obstacles in the development process of a country, including in Indonesia. The study was conducted to determine the effect of social assistance spending, infrastructure spending, and special allocation funds (DAK) on poverty in Indonesia. The data used is a time series from 2009-2023 sourced from the Central Statistics Agency and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. This study uses a quantitative method with a multiple linear regression model with the help of the SPSS 23 program. The results of this study indicate that social assistance spending has a negative and significant effect on poverty in Indonesia. Furthermore, infrastructure spending does not have a significant effect on poverty in Indonesia. Meanwhile, the Special Allocation Fund has a negative and significant effect on poverty in Indonesia.

Keywords: *Poverty, Social Spending, Infrastructure Spending, Special Allocation Funds.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan sering diartikan sebagai kondisi tingkat hidup yang rendah, di mana terdapat kekurangan materi dibandingkan dengan standar hidup yang



umumnya berlaku dalam suatu masyarakat. Sehingga sulit dalam memenuhi kebutuhan dasar akan pangan, sandang dan tempat tinggal (Fadillah & Sabar, 2023). Kemudian, Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) kemiskinan ialah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu dalam memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan & mengembangkan kehidupan yang layak.

Di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Pengukuran tingkat kemiskinan di Indonesia menggunakan pendekatan kebutuhan dasar, yang mencakup kebutuhan akan pangan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan (Saragih, 2015).

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan garis kemiskinan sebagai tingkat penghasilan minimum yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Garis kemiskinan Indonesia tercatat sebesar Rp550.458/bulan, dengan rata-rata garis kemiskinan per rumah tangga sebesar Rp2.592.657/bulan, pada tahun 2023. Sehingga penduduk yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan dianggap sebagai penduduk miskin.

Pada Tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia berada diangka 280,73 juta jiwa, di mana ada sekitar 25,89 juta jiwa penduduk Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan. Tahun demi tahun, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Namun, jumlah penduduk miskin di Indonesia tidak menunjukkan penurunan yang berarti.

Dalam lima tahun terakhir kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan yang cenderung lambat. Pada tahun 2019-2021 terjadi peningkatan terhadap kemiskinan di Indonesia yang diakibatkan oleh adanya pandemi covid-19. Dimana puncaknya terjadi pada tahun 2021 sebesar 10,14% dengan jumlah penduduk miskinnya sebanyak 27,54 juta jiwa. Ditahun berikutnya kemiskinan Indonesia mengalami penurunan yang disebabkan adanya upaya pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi setelah terjadinya pandemi sebesar 9,36% dengan jumlah penduduk miskinnya sebanyak 25,89 juta jiwa. Meskipun tingkat kemiskinan di Indonesia telah penurunan, namun apabila dibandingkan dengan sesama negara ASEAN justru penurunan tingkat kemiskinan Indonesia lebih kecil.

Salah satu indikator kesuksesan pembangunan di Indonesia adalah penurunan jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan. Di negara berkembang seperti Indonesia, masalah kemiskinan merupakan hambatan utama dalam upaya membangun ekonomi. Pembangunan ekonomi dilakukan dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan dan sosial termasuk masalah kemiskinan (Soleh, 2014).

Pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama dalam program pembangunan yang sejalan dengan prioritas MDGs dan SDGs dalam RPJPN 2005-2025. Meskipun program pemerintah telah berhasil mengurangi persentase kemiskinan, jumlah penduduk miskin masih tinggi. Upaya penurunan tingkat

kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui peluncuran berbagai program nasional yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Program-program ini dilaksanakan oleh beragam kementerian dan lembaga (Santoso, 2018).

Penanggulangan kemiskinan tidak bisa dipisahkan dari besarnya pengeluaran pemerintah. Dari tahun ke tahun, pengeluaran ini terus mengalami kenaikan, menunjukkan peran pemerintah yang semakin signifikan dalam bidang ekonomi. Pengeluaran pemerintah tidak hanya digunakan untuk kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga untuk mendanai kegiatan ekonomi (Putri, 2021). Pengeluaran pemerintah ialah belanja bantuan sosial dan belanja infrastruktur.

Studi yang dilakukan oleh Sumiyarti, (2022), menunjukkan bahwa program belanja bantuan sosial memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, yang berarti setiap peningkatan belanja bantuan sosial justru dapat meningkatkan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Sementara itu, penelitian oleh Liu, dkk., (2020); Fagbemi, dkk., (2022), mengemukakan pentingnya belanja bantuan sosial dan belanja infrastruktur dalam mengurangi kemiskinan.

Hasil penelitian tersebut selaras dengan teori Keynesian dalam Tungka, dkk. (2024), Keynes memberikan perspektif yang mendalam tentang bagaimana pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi perekonomian, terutama dalam upaya mengurangi kemiskinan. Menurut Keynes, permintaan agregat (total pengeluaran dalam perekonomian) merupakan faktor kunci yang menentukan tingkat produksi dan kesempatan kerja dalam jangka pendek. Keterkaitan antara pengeluaran pemerintah dan tingkat kemiskinan sangat kuat. Secara teoretis, pengeluaran pemerintah yang efisien, terutama dalam bentuk belanja sosial, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan (Suparno, 2014).

Mengalokasikan anggaran transfer fiskal dari pusat ke daerah merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal. Salah satunya yaitu, Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK adalah transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah (*conditional transfer*) yang ditujukan dalam membiayai kegiatan-kegiatan spesifik sesuai dengan kebutuhan daerah. Tujuan utama DAK untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah & meningkatkan kesejahteraan masyarakat. DAK diharapkan dapat berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan.

Terdapat beberapa studi yang mendukung diantaranya: dilakukan oleh Nugroho, dkk., (2021); Nurvita, (2024), mengemukakan bahwa DAK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Hasil ini juga selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Richard A. Musgrave dalam Yunus & Anwar (2021), yang menyatakan peran pemerintah dalam perekonomian terdiri dari tiga peran, yakni alokasi, distribusi dan stabilisasi. Dalam konteks kemiskinan, fungsi distribusi sangat berkaitan dengan DAK karena pemerintah

pusat mendistribusikan dana ini untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah yang sering menjadi penyebab terjadinya kemiskinan.

Dalam waktu lima tahun terakhir pengeluaran pemerintah dan dana alokasi khusus mengalami tren fluktuatif. Realisasi belanja bantuan sosial mengalami peningkatan signifikan dari Rp112,48 triliun pada 2019 menjadi Rp202,53 triliun pada 2020, kemungkinan sebagai respons terhadap kebutuhan sosial yang meningkat selama pandemi COVID-19. Setelah itu, terjadi penurunan bertahap hingga Rp156,60 triliun pada 2023. Selanjutnya, realisasi belanja infrastruktur mengalami peningkatan dari Rp26,52 triliun pada 2019 menjadi Rp33,22 triliun pada 2021, yang kemudian menurun drastis menjadi Rp17,29 triliun pada 2022, dan meningkat kembali menjadi Rp31,73 triliun pada 2023. Sementara itu, realisasi DAK mengalami penurunan dari Rp64,17 triliun pada 2019 menjadi Rp50,18 triliun pada 2020, kemudian meningkat kembali hingga mencapai Rp57,07 triliun pada 2021. Setelah itu, anggaran ini kembali mengalami penurunan hingga mencapai Rp50,33 triliun pada 2023.

Alokasi dana yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui kebijakan fiskal dalam pengentasan kemiskinan dapat dianggap sukses jika jumlah dan presentase masyarakat miskin berkurang, atau bahkan tidak ada. Dengan adanya pendanaan melalui pengeluaran pemerintah dan pengeluaran transfer, diharapkan mampu mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia sebagai upaya dalam pengentasan kemiskinan (Sasana, 2006). Penelitian ini menggabungkan antara variabel pengeluaran pemerintah dan pengeluaran transfer dalam kebijakan fiskal yang masih jarang ditemukan. Sehingga, perlunya dilakukan penelitian ini mengetahui sejauh mana pengaruh belanja bantuan sosial, infrastruktur dan dana alokasi khusus terhadap kemiskinan di Indonesia.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode bertujuan untuk mengetahui hubungan (pengaruh) antara variabel independen yaitu belanja bantuan sosial, belanja infrastruktur dan dana alokasi khusus terhadap variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis data sekunder dalam bentuk time series dengan kurun waktu dari tahun 2009-2023. Data penelitian ini didapatkan dari laman web resmi Badan Pusat Statistik, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pengaruh belanja bantuan sosial, belanja infrastruktur dan dana alokasi khusus terhadap kemiskinan di Indonesia ini menggunakan teknik analisis linear berganda dengan bantuan SPSS 23. Dimana model analisis linear berganda ini menggunakan alat analisis regresi Ordinary Least Square (OLS) atau regresi sederhana dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \mu \dots\dots\dots(1)$$

Dimana: Y adalah tingkat kemiskinan, β_0 adalah konstanta, β_1 - β_3 adalah koefisien regresi variabel, Ln adalah logaritma natural, X_1 adalah belanja bantuan sosial, X_2 adalah belanja infrastruktur, X_3 adalah dana alokasi khusus dan μ adalah error term.

Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan beberapa pengujian seperti uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah data layak untuk digunakan, terdiri atas uji normalitas, uji autokorelasi, uji heterskedastisitas dan uji multikolenearitas serta pengujian yang lain seperti uji regresi linear berganda, uji parsial atau uji t untuk melihat keterkaitan antar variabel, uji simultan atau uji f dan uji koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

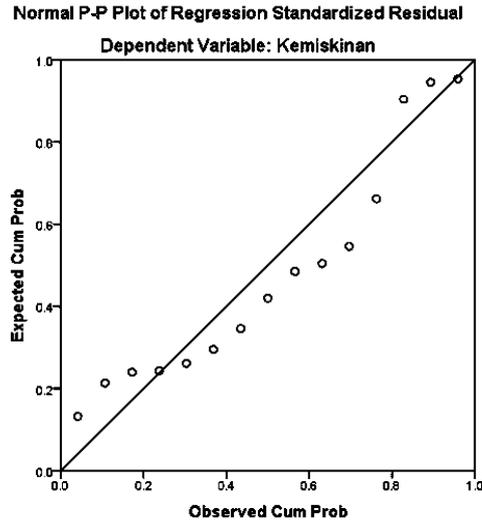
Dalam sebuah penelitian perlunya diketahui bagaimana statistik deskriptif pada setiap variabel yaitu tingkat kemiskinan, belanja bantuan sosial, belanja infrastruktur dan dana alokasi khusus. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa tingkat kemiskinan, belanja bantuan sosial, belanja infrastruktur dan dana alokasi khusus Indonesia tahun 2009-2023 mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2009, tingkat kemiskinan Indonesia berada di angka 14,15% dan terus mengalami penurunan hingga mencapai 9,41% di tahun 2019. Namun, terjadi peningkatan pada tahun 2020-2021 menjadi 10,14% akibat dampak pandemi covid-19 terhadap ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia mengalami penurunan yang terbilang lambat.

Selanjutnya, diketahui bahwa Pada tahun 2009 belanja bantuan sosial cenderung stabil, dengan pengeluaran sekitar Rp 73,8 triliun dan sedikit menurun menjadi Rp 68,6 triliun pada 2010. Setelah itu, anggaran kembali meningkat secara signifikan, terutama pada tahun 2019 sebesar Rp 112,5 triliun. Tahun 2020 mencatat lonjakan drastis dalam belanja bantuan sosial, mencapai Rp 202,5 triliun, kemungkinan besar sebagai respons dari efek sosial-ekonomi pandemi COVID-19.

Kemudian belanja infrastruktur mengalami tren peningkatan, dari Rp14,13 triliun pada 2009 hingga mencapai puncaknya di Rp33,22 triliun pada 2021. Sementara itu, dana alokasi khusus DAK mengalami peningkatan sebesar Rp 24,7 triliun pada tahun 2009 hingga mencapai Rp 64,1 triliun pada tahun 2019.

Selanjutnya, hasil pada pengujian asumsi klasik dengan menggunakan grafik Normal P-Plot akan menghasilkan satu garis lurus diagonal, lalu data yang di plot akan dibandingkan dengan garis diagonal tersebut. Jika distribusinya normal, data yang di plot mengikuti garis diagonal tersebut.

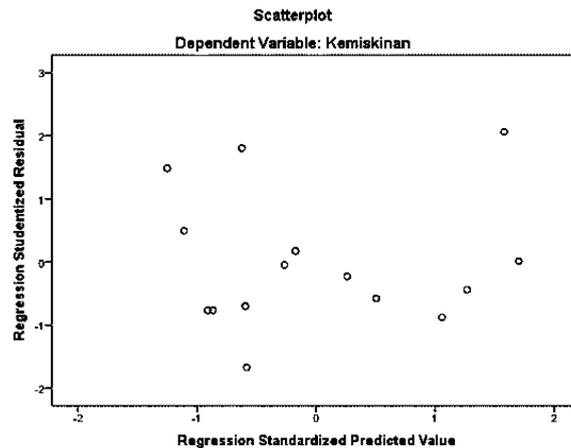


Gambar 1. Uji Normalitas

Sumber : SPSS 23 data diolah, 2024

Pada Gambar 1 grafik Normal P Plot, menggambarkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga menunjukkan pola distribusi normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi.

Selanjutnya, pengujian heterokedastisitas menggunakan grafik scatterplot. Dengan ketentuan apabila pada grafik Scatterplot, jika tidak ada heteroskedastisitas, titik-titik akan tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, serta tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Namun, jika terjadi heteroskedastisitas, titik-titik pada grafik Scatterplot akan membentuk pola teratur, seperti gelombang atau semakin menyempit.



Gambar 2. Grafik Scatterplot

Sumber : SPSS 23 data diolah, 2024

Adapun Gambar 2 menunjukkan hasil uji heterokedastisitas menggunakan grafik scatterplot. Berdasarkan scatterplot ini, terlihat bahwa titik-titik tersebar

secara acak tanpa membentuk pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Pengujian ketiga dalam uji asumsi klasik yaitu uji autokorelasi menggunakan uji run test. Apabila nilai sig lebih besar dari 0,05 tidak terdapat gejala autokorelasi.

Tabel 1. Hasil Uji Run Test

	Unstandardized Residual
Number of Runs	6
Z	-1.059
Asymp. Sig. (2-tailed)	.290

Sumber : SPSS 23 data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan nilai Asymp.Sig 0.290 lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini terbebas dari gejala autokorelasi.

Pengujian terakhir dalam uji asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas dimana pengujian ini, gejala multikolinieritas terdeteksi jika nilai VIF melebihi 10 atau tolerance kurang dari 0,10. Sebaliknya, jika VIF kurang dari 10 atau tolerance lebih dari 0,10, maka tidak ada indikasi terjadi multikolinieritas.

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Model	Tolerance	VIF
(Constant)		
Ln_X1	.858	1.166
Ln_X2	.707	1.414
Ln_X3	.769	1.301

Sumber : SPSS 23 data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 2 hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas yang serius di antara variabel independen (X1, X2, dan X3). Hal ini didasarkan pada nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 dari masing-masing variabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini terbebas dari adanya multikolinearitas. Adapun hasil uji regresi berganda sebagai berikut:

Table 3. Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t-hitung	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	90.726	11.258	-	8.059	.000
Ln_X1	-1.214	.421	-.354	-2.880	.015
Ln_X2	-1.123	.735	-.207	-1.528	.155
Ln_X3	-2.179	.446	-.634	-4.888	.000

Sumber : SPSS 23 data diolah, 2024

Berdasarkan pada hasil koefisien regresi (β) pada Tabel 3, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 90.726 - 1.214(\text{Ln}X_1) - 1.123(\text{Ln}X_2) - 2.179(\text{Ln}_X3) + 0.4254\dots (2)$$

Uji t atau uji parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel independen, berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dengan taraf signifikan penelitian dibandingkan dengan taraf α 0.05 dan t tabel sebesar 1.782. Apabila nilai signifikan < 0.05 dan nilai t hitung $> t$ tabel maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independent terhadap variabel dependen serta H_0 ditolak dan H_1 diterima sedangkan jika nilai signifikan > 0.05 dan t hitung $< t$ tabek maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variable independent terhadap variable dependen. Adapun hasil uji hipotesis dengan uji t dengan nilai koefisien masing-maing variabel sebagai berikut:

- a. Hasil perhitungan uji T menunjukkan bahwa Variabel belanja bantuan sosial (X_1) dengan nilai signifikan variabel sebesar $0.015 < 0.05$, dan $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ sebesar $-2.880 > -1.782$. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa belanja bantuan sosial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Y). Nilai koefisien β_1 sebesar -1.214 . Hal ini mengindikasikan bahwa belanja bantuan sosial dan kemiskinan memiliki arah yang negatif. Artinya, jika terjadi peningkatan 1% belanja bantuan sosial, maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 1.214%, asumsi ceteris paribus
- b. Variabel belanja infrastruktur (X_2) dengan nilai signifikan sebesar $0.115 > 0.05$ dan $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ sebesar $-1.528 < -1.728$. sehingga, dapat disimpulkan bahwa belanja infrastruktur berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan (Y).
- c. Variabel dana alokasi khusus (X_3) dengan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$ dan $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ sebesar $-4.888 > -1.728$. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh paling signifikan terhadap kemiskinan (Y). Nilai koefisien β_3 sebesar -2.179 . Hal ini mengindikasikan bahwa dana alokasi khusus dan kemiskinan memiliki arah yang negatif. Artinya, jika terjadi peningkatan 1% dana alokasi khusus, maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 2.179% asumsi ceteris paribus.

Adapun hasil uji hipotesis dengan uji f sebagai berikut:

Table 4. Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	25.608	3	8.536	22.121	.000 ^b
Residual	4.245	11	.386		
Total	29.853	14			

Sumber: SPSS 23 data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan nilai *f-hitung* 22.121, *f-tabel* yang diperoleh berdasarkan variabel yang digunakan dan tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0.05% maka didapatkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama (simultan) memengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menguji seberapa jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ialah antara 0 dan 1. Jika nilai R^2 sama dengan satu, ini menunjukkan kecocokan sempurna, di mana model regresi dianggap tepat karena mampu secara sempurna meramalkan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R^2 adalah nol, ini menandakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel respons dengan variabel bebas yang menjelaskan.

Table 5. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.926 ^a	.858	.819	.62120

Sumber : SPSS 23 data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 5 nilai koefisien determinasi sebesar 0.819 yang berarti pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) sebesar 81.9%. Adapun sisanya yaitu 18.1% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Pengaruh Belanja Bantuan Sosial terhadap Kemiskinan di Indonesia

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Artinya, setiap peningkatan alokasi belanja bantuan sosial mampu mengurangi kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian selaras dengan yang dilakukan oleh Liu dkk, (2020); Waqas dkk, (2022) menemukan bahwa *Social Expenditure* berpengaruh negatif dan signifikan dalam mengurangi kemiskinan di Tiongkok dan Pakistan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori pengeluaran pemerintah Keynes yang dikutip dalam Tungka, dkk. (2024), yang menjelaskan keterkaitan antara pengeluaran pemerintah dan tingkat kemiskinan sangat kuat. Secara teoretis, pengeluaran pemerintah yang efisien, terutama dalam bentuk belanja sosial, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan.

Menurut Barrientos & Shepherd (2003) dalam teori perlindungan sosialnya, yang mengatakan bahwa perlindungan sosial dapat diartikan sebagai serangkaian upaya publik yang ditujukan untuk menghadapi dan mengatasi kerentanan, risiko, serta kemiskinan yang telah melampaui batas (Supriyanto et al, 2014). Belanja bantuan sosial merujuk pada pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah berupa transfer uang, barang, atau jasa kepada

masyarakat. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial, meningkatkan kapasitas ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pratiwi, 2022).

Hal ini menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial yang dilakukan pemerintah selama periode tahun 2009-2023 berperan penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai program bantuan, seperti: Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang menasar langsung masyarakat miskin. Selain itu, dengan menyediakan sumber pendapatan tambahan, program bantuan sosial membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Di sisi lain, fokus pada akses pendidikan dan layanan kesehatan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk membangun fondasi yang kuat bagi individu untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas mereka, serta membuka peluang bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan.

Namun, hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mufliha (2019); Sumiyarti (2022), yang menemukan bahwa belanja bantuan sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Adapun hasil temuan yang berbeda oleh Sari & Marissa (2023); Nurvita (2024), yang menemukan bahwa belanja bantuan sosial tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

2. Pengaruh Belanja Infrastruktur terhadap Kemiskinan di Indonesia

Menurut Tim LPEM-PSEKP-PSP yang dikutip oleh Maulana (2021), yang menyatakan salah satu metode yang cukup efektif untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan membangun infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dasar dapat mendorong peningkatan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional.

Hasil penelitian ini menunjukkan belanja infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa meskipun ada indikasi hubungan negatif, hal ini tidak cukup kuat untuk disimpulkan bahwa peningkatan belanja infrastruktur secara konsisten menurunkan kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori pengeluaran pemerintah Keynes yang dikutip dalam Tungka, dkk. (2024), yang menjelaskan keterkaitan antara pengeluaran pemerintah dan tingkat kemiskinan sangat kuat. Secara teoretis, pengeluaran pemerintah yang efisien, terutama dalam bentuk belanja sosial, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, dapat menurunkan angka kemiskinan. Selain itu

Hal ini, dapat disebabkan oleh beberapa faktor : Salah satunya adalah waktu yang diperlukan untuk menunjukkan dampak pembangunan infrastruktur terhadap masyarakat miskin. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum sering kali memerlukan waktu lama untuk dapat memberikan manfaat ekonomi langsung kepada kelompok miskin. Selain itu, alokasi belanja infrastruktur yang lebih banyak difokuskan pada wilayah

perkotaan dapat mengakibatkan dampaknya tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat miskin di pedesaan, yang lebih rentan terhadap kemiskinan.

Faktor lain yang mungkin berkontribusi adalah ketidakefisienan dalam penggunaan dana infrastruktur, misalnya karena korupsi atau birokrasi yang berlebihan, yang menghambat pelaksanaan proyek. Akibatnya, manfaat dari belanja infrastruktur mungkin belum dirasakan secara optimal oleh kelompok masyarakat yang seharusnya mendapatkan dampak positif dari kebijakan tersebut. Dengan demikian, meskipun belanja infrastruktur memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan, seperti dalam peningkatan akses fasilitas publik, lapangan pekerjaan dan peningkatan konektivitas antarwilayah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, belanja infrastruktur yang dilakukan pemerintah pada periode 2009-2023 belum mampu memberikan dampak yang dapat mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap bagaimana belanja infrastruktur (perumahan/fasilitas umum) dialokasikan dan diimplementasikan, serta pentingnya memastikan bahwa proyek infrastruktur secara langsung memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat miskin.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu & Hendarto (2016), yang menyatakan bahwa belanja infrastruktur tidak berpengaruh terhadap kemiskinan yang ada di Indonesia. Hasil Penelitian berbeda yang dilakukan oleh Munanda (2019); Fagbemi (2022); Sihombing et al. (2022) yang justru menemukan bahwa pengeluaran/belanja infrastruktur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia maupun Nigeria. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Azhar (2022), menemukan bahwa belanja infrastruktur berpengaruh positif terhadap kemiskinan Indonesia.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan di Indonesia

Hasil penelitian ini menunjukkan dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi DAK secara nyata berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini berarti bahwa kebijakan pemerintah yang mengalokasikan DAK selama periode 2009-2023 untuk mendanai kegiatan yang bersifat khusus, seperti pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan serta lingkungan hidup telah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di wilayah-wilayah tertentu.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Nugroho dkk (2021); Panggabean & Hariani (2022); Nurvita (2024); menemukan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian mereka menguatkan argumen bahwa DAK efektif dalam mengurangi disparitas antar daerah, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.

Penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Richard A. Musgrave; Yunus & Anwar (2021), yang menyatakan peran pemerintah dalam perekonomian terdiri dari tiga peran, yakni alokasi, distribusi dan stabilisasi. Dalam konteks kemiskinan, fungsi distribusi sangat berkaitan dengan dana alokasi khusus. Pemerintah pusat mendistribusikan dana ini untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah yang sering menjadi penyebab terjadinya kemiskinan.

Hal ini juga sejalan dengan teori Bahar (2009), yang dikutip dalam Abror (2023) menyatakan bahwa dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan tanggung jawab daerah dan sesuai dengan prioritas nasional yang diharapkan dapat membantu mengurangi disparitas dan kemiskinan antar wilayah. DAK merupakan bentuk transfer yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu (*specific purpose transfer*). *Specific Transfer* diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan persyaratan yang telah ditetapkan, misalnya untuk mendanai sektor-sektor tertentu atau proyek tertentu (Alfian dkk, 2022).

Penggunaan transfer ini diatur secara detail oleh pemerintah pusat, sehingga memberikan sedikit keleluasaan bagi pemerintah daerah. Jenis transfer ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Alfian dkk. (2022) Besaran DAK yang diberikan pemerintah kepada daerah dapat ditentukan melalui beberapa mekanisme, seperti kesenjangan fiskal (*deficit grant*), alokasi dana berdasarkan biaya per unit (*unit cost grant*), jumlah pinjaman dari pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas publik oleh pemerintah daerah yang berjangka menengah atau panjang (*capitalization grant*), serta subsidi, misalnya dalam bentuk persentase pinjaman yang ditanggung oleh pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas publik melalui mekanisme utang pemerintah daerah (*subsidised loan*).

Pengalokasian dana alokasi khusus yang efektif dapat mengatasi ketimpangan regional yang sering menjadi penyebab terjadinya kemiskinan dan meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, serta menciptakan lapangan kerja, yang semuanya berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan. Namun, hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiyanto et al. (2016); Alvaro & Zahara (2022); menemukan bahwa dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis persamaan regresi maka dapat disimpulkan bahwa belanja bantuan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, belanja infrastruktur infrastruktur berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, Dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dan

belanja bantuan sosial, belanja infrastruktur dan DAK secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka direkomendasi saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini sebagai berikut: Pemerintah perlu mengoptimalkan pengeluaran bantuan sosial dengan memperluas cakupan program, memastikan penyaluran atau distribusi yang tepat sasaran, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan belanja infrastruktur (perumahan/fasilitas umum), terutama terkait pemerataan dan efektivitas program pembangunan. Perlu dipastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga mencakup wilayah-wilayah tertinggal yang lebih membutuhkan, agar dampak dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat miskin di seluruh Indonesia.

Pemerintah perlu mempertimbangkan peningkatan anggaran dana alokasi khusus, terutama untuk sektor-sektor yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat miskin, seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaannya agar dana tersebut dapat digunakan secara efisien dan tepat guna. Selanjutnya, bagi peneliti berikutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan melibatkan variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini atau mengkaji lebih dalam terkait dengan variabel yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- (1) Abror, V.B. (2023) 'Pengaruh Dau, Dak Dan Pad Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2019', *Counting: Journal of Accounting*, 5(4), pp. 273–280.
- (2) Alfian Mujiwardhani, Lisno Setiawan, A.N. (2022) 'Dana Alokasi Khusus di Indonesia', pp. 1–56.
- (3) Alvaro, R. and Zahara, E.L. (2022) 'Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Di Indonesia', *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 4(2), pp. 106–124. doi:10.22212/jbudget.v4i2.77.
- (4) Fadillah, N. and Sabar, W. (2023) 'Efek Belanja Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran, dan Kemiskinan di Kabupaten Gowa', *Bulletin of Economic Studies (BEST)*, 3(1), pp. 25–37. <https://doi.org/10.24252/best.v3i1.35390>
- (5) Fagbemi, F., Osinubi, T.T. and Adeosun, O.A. (2022) 'Enhancing sustainable infrastructure development: A boon to poverty reduction in Nigeria', *World Development Sustainability*, 1, p. 100006.
- (6) Hidayat, A.Y. and Azhar, Z. (2022) 'Analisis pengeluaran pemerintah di

- sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia', *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(1), pp. 65–74.
- (7) Liu, W., Li, J. and Zhao, R. (2020) 'Rural public expenditure and poverty alleviation in China: A spatial econometric analysis', *Journal of Agricultural Science*, 12(6), p. 46.
 - (8) Maulana, M.F.A. (2021) 'Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Di Bidang Pembangunan Desa Dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kemiskinan Desa Di Kabupaten Sidoarjo'. UPN" VETERAN'JAWA TIMUR.
 - (9) Mufliha, N.M. (2019) 'Pengaruh Penyaluran Dana ZIS, Belanja Bantuan Sosial, Dan Belanja Subsidi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 2013-2017', *Gastronomía ecuatoriana y turismo local.*, 1(69), pp. 5–24.
 - (10) Munanda, R. (2019) 'Pengaruh Dana Otonomi Khusus Aceh (Doka), Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Perumahan Dan Fasilitas Umum Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh Tahun 2012-2017'. Universitas Gadjah Mada.
 - (11) Nugroho, D.F., Wicaksono, B.R. and Reynaldi, M.R. (2021) 'Special allocation fund and poverty rate in Indonesia', *Economics and Finance in Indonesia*, 67(2), p. 7.
 - (12) Nurvita, B.S.R. (2024) 'Pengaruh Realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan'. UNIVERSITAS BAKRIE.
 - (13) Panggabean, H.L. and Hariani, D. (2022) 'Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening Tahun 2015-2019', *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), pp. 2200–2208.
 - (14) Pasaribu, Y. and HENDARTO, R.M. (2016) 'Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Infrastruktur terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010-2013 (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia)'. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
 - (15) Pratiwi, H.E. (2022) 'Tinjauan Pelaksanaan Penyaluran Belanja Bantuan Sosial BPNT selama Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Magelang Tahun 2020-2021'. Politeknik Keuangan Negara STAN.
 - (16) Putri, E.M. and Putri, D.Z. (2021) 'Pengaruh upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, pendidikan dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di indonesia', *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(2), pp. 106–114.
 - (17) Santoso, D. (2018) *Penduduk miskin transient: masalah kemiskinan yang terabaikan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- (18) Saragih, J.P. (2015) 'Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), pp. 45–59.
- (19) Sari, D.I. and Marissa, F. (2023) 'Pengaruh Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Kemiskinan di Indonesia', *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 3(2), pp. 346–359.
- (20) Sasana, H. (2006) 'Analisis Kemandirian Fiskal dilihat dari Faktor-Faktor Ekonomi Daerah', *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(2).
- (21) Sihombing, P.R., Muslianti, D. and Yunita (2022) 'Retraction Notice To "Apakah Dana Desa dan Fungsi Belanja APBD Mampu Mengatasi Kemiskinan di Indonesia?"', *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 2(2), pp. 236–243. doi:10.11594/jesi.02.02.12.
- (22) Soleh, A. (2014) 'Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia', *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2).
- (23) Sumiyarti, S. (2022) 'Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan', *Srikandi: Journal of Islamic Economics and Banking*, pp. 28–43.
- (24) Suparno, H. (2014) 'Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur', *Journal of Innovation in Business and Economics*, 5(1), pp. 1–22.
- (25) Supriyanto, R.W., Ramdhani, E.R. and Rahmadan, E. (2014) *Social protection in Indonesia: Challenges and Future*, Bappenas.
- (26) Tungka, E.M., Maramis, M.T.H.B. and Kawung, G.M. V (2024) 'Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara', *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 25(2), pp. 180–194.
- (27) Waqas, M., Awan, M.S. and Sánchez-Juárez, I. (2022) 'Social protection expenditures, poverty, inequality, and economic growth in Pakistan', *Paradigma económico. Revista de economía regional y sectorial*, 14(1), pp. 57–75.
- (28) Widiyanto, A., Sedyautami, E.U. and Nurmansyah, A.L. (2016) 'Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Tegal)', *Monex: Journal of Accounting Research*, 5(2).
- (29) Yunus, R. and Anwar, A.I. (2021) *Ekonomi Publik*. Penerbit NEM.